

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Demokrasi saat ini sudah tidak asing lagi didengar oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti di Indonesia yang telah menerapkan sistem demokrasi sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi tertuang dalam:

1. Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke 4 yaitu: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara RI yang berbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang *berkedaulatan rakyat* ..."
2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *kedaulatan di tangan rakyat* dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (Winarno: 2010:106).

Demokrasi bukanlah suatu pola pikir atau perilaku politik semata melainkan proses berperannya masyarakat dan negara untuk membangun sistem kehidupan yang sejahtera dengan terciptanya keadilan baik secara sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. "Demokrasi tidak hanya memerlukan hukum, peraturan dan lembaga yang mampu menegakkannya, melainkan juga memerlukan sikap demokrasi" (Zamroni, 2001:16). Dengan demikian, penanaman nilai demokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan sejak dini secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan agar pelaksanaan demokrasi tidak menjurus pada sikap anarki yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum. Penanaman nilai demokrasi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat agar berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Selain untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, pendidikan demokrasi dapat merubah tatanan masyarakat ke jenjang yang lebih baik, menjadikan warganegara yang bermoral, mandiri, sejahtera, dan dapat menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Lebih jelasnya pendidikan demokrasi ini dilaksanakan guna terciptanya suatu masyarakat yang beradab atau sering disebut dengan masyarakat madani.

Penelitian Avianto (2013) yang berjudul “Penanaman Nilai Demokrasi dalam Proses Pembelajaran PKn” menyimpulkan bahwa penanaman nilai demokrasi sudah sesuai dengan tolak ukurnya yaitu mengenai kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, menghormati orang lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Selain itu, terdapat kasus-kasus terkait penyimpangan dalam demokrasi misalnya seperti lembaga pers mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dikabarkan mendapat kekangan dari pihak rektorat, salah satu contohnya kampus Unigha di Aceh melakukan pencekalan terhadap Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Pijar, karena memberitakan kasus korupsi. Juga LPM Estetika Universitas Negeri Makasar yang dicekal rektornya karena dituduh mempropaganda mahasiswa saat pelatihan. Kasus lain yang tidak kalah serunya, seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Semarang dipaksa keluar karena menulis di blog yang berisi kritikan terhadap kampusnya

(Tempo.co, September 2013). Kasus yang lebih umum adalah terjadinya intimidasi serta teror saat pilkada Aceh (*The Aceh Traffic*, April 2010).

Di samping pemberitaan media di atas, penyimpangan demokrasi terjadi pada saat demonstrasi. Misalnya masih banyak pengunjung rasa yang berbuat anarki sehingga merusak fasilitas umum yang ada. Contohnya sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) Makassar menyerang beberapa tempat ibadah non muslim di Makassar seperti di Klenteng *Xian Ma* dengan melempar batu ke arah patung Rupang Budha Mahayana hingga mengenai dudukan patung tersebut sampai terjadi kerusakan dan tulisannya copot (Tribun-Timur.com, Agustus 2012). Selain itu, sejumlah mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) bertindak anarkis dengan saling memukul mahasiswa lain ditempat pemungutan suara dalam rangka pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada Selasa 14 Mei 2013 (Suara Merdeka, Mei 2013).

Berdasarkan uraian singkat di atas, ternyata masih banyak konflik terkait pelanggaran demokrasi yang terjadi di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pelaksanaan pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani mutlak diperlukan untuk setiap warganegara. Melalui pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani, setiap warga dapat menuangkan pemikirannya, bersikap saling menghormati dan menghargai, serta mau menerima keberagaman yang ada. Dengan demikian keberadaan pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani sangat penting sebagai pedoman untuk berperilaku yang baik dalam bermasyarakat sehingga menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan bagi kehidupan bersama.

Pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani ditransformasikan di sekolah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran PKn sebagai sarana pendidikan demokrasi mengemban tugas menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis untuk mendukung tegaknya demokrasi (Winarno, 2007:115). Selain itu, juga merupakan sarana untuk mengaktualisasikan dan melestarikan demokrasi. Mata pelajaran ini juga berperan dalam menanamkan nilai demokrasi yang dipertegas dalam visi, misi, dan tujuannya. Berikut ini adalah visi PKn yaitu:

Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (BNSP, 2006:95-96).

Visi PKn tersebut jelas mencerminkan pendidikan demokrasi, karena prinsip utamanya didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sementara itu Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana disinggung di depan merupakan landasan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya visi PKn tersebut dituangkan dalam misinya yakni “Menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warganegara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (BNSP, 2006:95-96).

Selanjutnya visi dan misi tersebut dipertegas dalam tujuan PKn, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BNSP, 2006:96).

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan tersebut PKn diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas, berbudi pekerti luhur, cerdas, bertanggungjawab, dan sadar dalam bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku yang demokratis serta taat kepada aturan.

Visi, misi, dan tujuan PKn selanjutnya dijabarkan dalam kurikulum, karena itu muatan kurikulum PKn semestinya juga memuat materi mengenai pemahaman dan kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara, dalam hal ini faham dan mengamalkan nilai-nilai demokratis. Kurikulum PKn memuat materi-materi yang mendukung terlaksananya pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani, seperti materi budaya demokrasi, masyarakat madani, dan pemilu di Indonesia. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri peserta didik untuk memiliki sikap yang demokratis baik dalam lingkup sekolah maupun negara.

Pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani merupakan bagian dari materi PKn kelas XI SMK. Materi tersebut dituangkan dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai sarana untuk dijadikan patokan agar siswa lebih mudah memahami terkait pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani. Salah satu SK yang terkait yaitu “menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani”, sedangkan KDnya:

1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi.
4. Menampilkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari (BNSP, 2006:100).

Berdasarkan SK dan KD tersebut memuat materi yang mendukung terlaksananya pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani. Muatan materi yang berkaitan dengan budaya demokrasi menuju masyarakat madani tersebut antara lain ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat, demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat, toleran atau sikap saling menghormati dan menghargai, pluralisme atau kemajemukan, dan keadilan sosial atau keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Materi-materi tersebut diharapkan dapat menciptakan peserta didik menjadi generasi muda yang diinginkan oleh bangsa dan negara dengan memiliki sikap saling menghormati, menghargai, mau menerima perbedaan, pandai dalam berpendapat serta mengetahui akan hak dan kewajibannya sehingga terciptalah kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Visi, misi, dan tujuan PKN yang dijabarkan dalam kurikulum tersebut selanjutnya dituangkan dalam bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar tersebut disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar yang disusun secara tertulis biasanya berbentuk cetak (*printed*) misalnya buku atau yang biasa disebut dengan buku paket. Mengacu dari penjelasan di atas materi-materi PKN tersebut kemudian dituangkan dalam buku ajar PKN. Keberadaan buku ajar diharapkan dapat menjadi sarana

pembelajaran siswa untuk materi PKn, dalam hal ini khususnya materi pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani.

Penuangan materi PKn dalam buku pelajaran dipertegas dari hasil penelitian Pratiwi (2012) yang berjudul: “Muatan Materi dan Pelaksanaan Pendidikan Ketaatan Hukum Analisis Isi Buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII MTS Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013”, hasilnya menyatakan bahwa buku PKn memuat materi-materi berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), serta kemerdekaan mengemukakan pendapat. Sementara itu, penelitian Sulistyono (2011) yang berjudul: “Muatan dan Penanaman Kesadaran Berkonstitusi, Studi Kasus Penggunaan Buku PKn Karangan Dadang Sundawa, dkk di SMP Negeri 3 Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Tahun 2011”, menyimpulkan bahwa buku PKn memuat mengenai materi-materi terkait dengan peraturan-peraturan, norma-norma, konstitusi yang berlaku di masyarakat maupun negara. Dengan demikian, buku PKn yang diteliti tersebut memuat materi PKn sebagaimana yang dijabarkan dalam kurikulum PKn.

Buku ajar merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran di sekolah, kualitas dalam buku ajar berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Kualitas tersebut dapat dilihat dari isi materi yang terkandung di dalam buku dan kesesuaian dengan kurikulum. Meskipun buku ajar dirancang sesuai dengan kurikulum, namun pada kenyataannya masih banyak buku ajar yang kurang berkualitas atau tidak sesuai dengan kurikulum. Misalnya wacana yang

berceritakan *Resep Ganja Sebagai Obat Awet Muda* menjadi bacaan siswa SD (Bilal, 2012). Kemudian juga LKS kelas 2 SD yang terdapat kisah cerita mengenai istri simpanan dengan judul Bang Maman dari Kali Pasir (Doni, 2012), serta LKS SMP di Mojokerto yang terpampang gambar Miyabi atau foto bintang porno (Bilal, 2012) juga tidak layak digunakan dalam proses pembelajaran karena dapat berakibat fatal dengan rusaknya moral setiap siswa. Kasus LKS yang tidak kalah heboh dan mengguncangkan masyarakat yaitu keberadaan LKS PKn untuk siswa SMA kelas 1 di Sukabumi Jawa Barat tentang jawaban soal Ideologi Bangsa Indonesia yang seharusnya Pancasila diganti menjadi komunis dalam kunci jawabannya (Kristanti dan Permadi, 2012). Sementara itu penelitian Rosita (2011) yang berjudul “Analisis Buku Teks Mata Pelajaran PKn Kelas II Sekolah Dasar (SD)” menyimpulkan bahwa pendekatan penulisan buku teks tidak sesuai dengan pendekatan dalam kurikulum 2006, materi dalam buku teks kurang sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum tahun 2006, dan sistem evaluasi dalam buku teks cenderung pada aspek kognitif saja dan tidak terdapat aspek psikomotorik. Selain itu, penelitian Nurdiansyah (2011) yang berjudul “Analisis Buku Ajar PKn Kelas V Sekolah Dasar” menyimpulkan bahwa materi dalam buku ajar kurang sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum KTSP. Hal ini menegaskan bahwa masih terdapat buku ajar yang tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Kesesuaian buku ajar dengan kurikulum sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas buku itu sendiri. Buku ajar yang disusun sesuai dengan kurikulum dapat menunjang proses pembelajaran khususnya di sekolah. Buku ajar PKn yang disusun berdasarkan kurikulum memuat materi tentang pendidikan

demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani. Namun, kenyatannya tidak semua materi yang ada di dalam buku PKn diajarkan kepada siswa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap analisis isi buku dan pelaksanaannya pada suatu instansi pendidikan. Oleh karena itu, dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang muatan materi dan pelaksanaan pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani, yang dilakukan dengan analisis isi pada buku PKn kelas XI karangan Retno Listyarti dan Setiadi serta pelaksanaannya di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2013/ 2014.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana muatan materi pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dalam buku pelajaran PKn karangan Retno Listyarti dan Setiadi yang digunakan di kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dalam proses pembelajaran PKn di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan muatan materi pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dalam buku pelajaran PKn karangan Retno Listyarti dan Setiadi yang digunakan di kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dalam proses pembelajaran PKn di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah khasanah konsep mengenai muatan materi pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti berikutnya yang relevan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi siswa
 - 1) Memperoleh buku yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa.

2) Memperoleh buku yang baik sebagai acuan dalam pembelajaran, sesuai dengan tuntutan kurikulum.

3) Terhindar untuk membaca buku yang tidak sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa.

b. Manfaat bagi guru

1) Memiliki buku ajar yang berkualitas, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan kurikulum PKn.

2) Menjadikan buku ajar sebagai acuan atau pedoman dalam belajar dan mengajar.

c. Manfaat bagi sekolah

1) Memiliki dan menetapkan buku pegangan siswa yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan sekolah.

2) Ketika menetapkan buku pegangan siswa, tidak terpengaruh oleh penerbit yang tidak profesional dalam menerbitkan buku ajar.

E. Daftar Istilah

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muatan adalah isi (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:1044), disebut pula barang yang diangkat dari kendaraan, isi, atau jumlah listrik positif atau jumlah negatif yang ada dalam benda (KUBI, 2005:757). Jadi muatan adalah isi yang ada dalam suatu benda.

2. Pendidikan adalah suatu kompleks perbuatan yang sistematis untuk membimbing anak menuju pada pencapaian tujuan pendidikan (Jumali dkk, 2008:21). Dirumuskan pula sebagai semua daya upaya yang ditujukan untuk menolong anak dalam perkembangannya baik jasmani maupun rohaninya menjadi manusia dewasa yang susila (Purwanto, 2009:150). Jadi pendidikan adalah suatu perbuatan yang diusahakan dengan segala upaya untuk membimbing perkembangan anak secara jasmani maupun rohani dari kecil hingga menjadi manusia dewasa bersusila.
3. Demokrasi adalah sistem politik mengenai tata cara mengikut sertakan warga atau rakyat dalam membuat suatu keputusan (Soehino, 2010:12-13), atau sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo dalam Winarno, 2010:91). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang menunjukan kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh wakil-wakil yang mewakili mayoritas dalam pemilihan-pemilihan berkala dengan pengawasan secara efektif oleh rakyat dan didasarkan atas prinsip kesamaan politik serta diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
4. Masyarakat madani adalah sistem sosial berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat (Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2010:241). Masyarakat madani

adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri sendiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik (Azra, 2003:240). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat yang mandiri berprinsip moral untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dalam mengemukakan pendapat dan kestabilan masyarakat serta lembaga-lembaga dalam menyalurkan aspirasi maupun kepentingan publik.

5. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya merupakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warganegara (Winarno, 2010:111). Atau proses mengembangkan diri seseorang dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi (Zamroni, 2001:24-40). Jadi pendidikan demokrasi adalah proses pengembangan diri seseorang dengan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi.